

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi ekonomi politik Indonesia dalam merespon investasi dan teknologi kendaraan listrik global merefleksikan karakteristik *complex interdependence*. Negara tidak lagi bergantung pada diplomasi tradisional, melalui pemanfaatan *multiple channels* lintas sektoral seperti Kementerian ESDM, BKPM, hingga Indonesia Battery Corporation (IBC) memiliki tujuan untuk mengunci komitmen aktor asing melalui interaksi G2B dan B2B. Pendekatan ini menandai *absence of hierarchy of issues*, di mana agenda ekonomi dan pemenuhan *green industry* memiliki urgensi yang setara dengan kedaulatan negara. Pemenuhan standar keberlanjutan global melalui instrumen SIMBARA, TKBI, dan audit PROPER bukan lagi hambatan, namun sebagai instrumen yang ditujukan untuk melegitimasi dan membuktikan kepatuhan ESG dan akuntabilitas rantai pasok Indonesia di pasar global.

Terakhir, Indonesia mengoperasionalkan kekuatan sumber dayanya melalui instrumen *economic statecraft* yang bersifat proaktif melalui skema investasi raksasa yang terintegrasi dari hulu ke hilir seperti Indonesia Grand Package. Strategi ini dibagi menjadi dua proyek dalam pelaksanaannya, pertama, Proyek Titan yang melibatkan konsorsium dari Korea Selatan yaitu LG Energy Solution serta Proyek Dragon yang bekerja sama dengan konsorsium Tiongkok yaitu CATL. Kedua proyek ini dirancang bukan sekedar untuk mengeksplorasi

bahan mentah, melainkan mewajibkan adanya transfer teknologi dan pembangunan basis manufaktur di dalam negeri sebagai syarat mutlak akses terhadap cadangan nikel nasional. Penggunaan daya tawar sumber daya alam ini membuktikan bahwa posisi tawar Indonesia bersandar pada kemampuan negara dalam menyelaraskan berbagai agenda ekonomi, teknologi, dan lingkungan menjadi satu kekuatan kedaulatan industri yang terintegrasi. Sehingga, strategi ini efektif meminimalisir ketergantungan pada kekuatan militer dan beralih menggunakan kepastian regulasi serta keunggulan komparatif mineral kritis nikel sebagai dasar dalam memenangkan persaingan di era transisi energi global.

Namun, dibalik strategi membangun *bargaining position* tersebut, terdapat realitas di lapangan yang menunjukkan rekonfigurasi ketergantungan. Meski Indonesia berhasil keluar dari jebakan eksportir *raw material*, implementasi kebijakan ini memunculkan kerentanan baru pada dominasi investasi dan teknologi Tiongkok di sektor *midstream*. Pemenuhan *green industry* masih dibayangi oleh kemunafikan lingkungan, di mana masifnya operasional smelter yang ditenagai oleh PLTU *captive* berbasis batubara yang merusak daya dukung lingkungan dan mengganggu aktivitas masyarakat lokal. Posisi strategis nikel semakin rentan ditambah dengan adanya ancaman inovasi baterai bebas nikel bertipe LFP. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa supaya strategi ekonomi politik ini tidak berujung menjebak Indonesia pada posisi *middle income trap*, pemerintah diharapkan untuk tidak hanya mengandalkan daya tawar sumber daya alamnya, melainkan memastikan adanya tata kelola ekologi yang ketat serta kemandirian teknologi yang berdaulat utuh.

4.2 Saran

Meskipun Indonesia memiliki posisi tawar yang kuat melalui penguasaan cadangan mineral kritis, implementasi strategi ekonomi politik dalam industri kendaraan listrik masih dihadapkan pada sejumlah tantangan struktural dan batasan teknis. Berdasarkan analisis terhadap dinamika *complex interdependence* dan dinamika ekonomi politik Indonesia di sektor mineral kritis, terdapat beberapa saran ditujukan bagi para pemangku kepentingan. Pertama, penegakan standar ekologis yang terintegrasi. Pemerintah perlu mengintegrasikan SIMBARA dan TKBI untuk mencegah praktek *environmental hypocrisy*. Langkah ini wajib bersamaan dengan pembatasan penggunaan PLTU *captive* dan perlindungan terhadap ruang hidup masyarakat lokal, guna menjaga legitimasi industri hijau Indonesia. Kedua, perluasan diplomasi ekonomi sebagai upaya melepaskan diri dari ketergantungan investor asing, Indonesia harus mendiversifikasi *multiple channels* dengan menarik kemitraan strategis. Ketiga, akselerasi riset dan alih teknologi, dengan adanya baterai LFP. Pemerintah wajib memberikan insentif bagi kolaborasi riset antara *multinational company* dan institusi domestik. Hal-hal ini penting untuk mempercepat transfer teknologi dan mendorong ekonomi sirkular demi mencegah jebakan *middle income trap*. Keempat, konsistensi regulasi dalam menghadapi tantangan hukum internasional, mengingat adanya tantangan di WTO, Indonesia perlu memperkuat argumentasi hukum dan teknis yang berfokus pada hak berdaulat atas sumber daya alam serta kaitan hilirisasi dengan pencapaian target *Net Zero Emission* global sebagai bagian dari tanggung jawab iklim dunia.

Mengingat masih adanya keterbatasan dan ketidaksempurnaan penelitian ini, peneliti menyadari akan hal-hal yang nantinya dapat diperbaiki melalui penelitian-penelitian selanjutnya. Penelitian selanjutnya, dapat melakukan eksplorasi lebih lanjut terhadap isu-isu yang belum sepenuhnya dibahas dalam penelitian ini. Salah satu pembahasan dapat diarahkan pada kecenderungan sejumlah negara Barat yang dalam beberapa tahun terakhir kembali mengembangkan dan mempromosikan kendaraan *hybrid*, baik itu *Plug in Hybrid Electric Vehicle* (PHEV) ataupun *Hybrid Electric Vehicle* (HEV), di tengah upaya global menuju elektrifikasi melalui kendaraan listrik. Fenomena ini menarik untuk dikaji, mengingat negara-negara tersebut sebelumnya dikenal sebagai pelopor dalam pengembangan kendaraan listrik, salah satunya pabrikan Amerika yaitu merek Tesla. Fenomena ini penting untuk diteliti lebih lanjut karena perubahan strategi negara-negara barat dan preferensi pasar global akan berpotensi mempengaruhi posisi tawar Indonesia dalam industri kendaraan listrik dan GVC.